



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

DINAS PARIWISATA
TAHUN 2024

**LAPORAN KINERJA DINAS PARIWISATA
TAHUN 2023**



**DINAS PARIWISATA
TAHUN 2024**

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Badan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2023.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Bantul, Februari 2024

Kepala,

Kwintarto Heru Prabowo, S.So.
NIP. 197204131998031008

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pariwisata telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2023 Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12

Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pariwisata diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Dinas Pariwisata adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata
- d. Pelaksanaan administrasi pada Dinas Pariwisata
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 176,61%. Ada empat (4) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), meliputi :

1. Jumlah Kunjungan Wisatawan
2. Lama Tinggal Wisatawan
3. Jumlah Belanja Wisatawan
4. Jumlah Parameter Kabupaten Kreatif yang Dipenuhi

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Pariwisata yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	ix
Bab I Pendahuluan.....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Pembentukan OPD.....	3
C. Susunan Organisasi.....	3
D. Keragaman SDM.....	4
E. Isu Strategis.....	5
F. Cascading Kinerja	6
G. Peta Proses Bisnis	8
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.....	13
Bab II Perencanaan Kinerja.....	14
A. Rencana Strategis.....	14
1. Tujuan dan Sasaran.....	15
2. Kebijakan,Strategi dan Program.....	16
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.....	19
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	20
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	22
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	23
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	24
1. Sasaran Jumlah Kunjungan Wisatawan.....	24
2. Sasaran Lama Tinggal Wsiatawan.....	28
3. Sasaran Jumlah Belanja Wisatawan.....	32

4. Sasaran Jumlah Parameter Kabupaten Kreatif Yang Dipenuhi.....	35
C. Akuntabilitas Anggaran	36
D. Efisiensi Sumber Daya.....	38
E. Lintas Sektor.....	39
Bab IV Penutup	40

Daftar Tabel

Tabel I.1	Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan, Golongan dan Jenis Kelamin.....	4
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	16
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.....	17
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	18
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja(PK) Tahun 2023.....	19
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023.....	21
Tabel III.1	Skala Nilai Perangkat Daerah.....	23
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	23
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Jumlah Kunjungan Wisatawan.....	24
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Lama Tinggal Wisatawan.....	28
Tabel III.5	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Jumlah Belanja Wisatawan.....	32
Tabel III.6	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Jumlah Parameter Kabupaten Kreatif Yang Dipenuhi.....	35
Tabel III.7	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023....	36
Tabel III.8	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023.....	38
Tabel III.9	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	39

Daftar Gambar

Gambar I.1	Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.....	4
Gambar I.2	Cascading Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2023	7
Gambar I.3	Peta Proses Bisnis.....	8
Gambar III.1	Grafik Sasaran Jumlah Kunjungan Wisatawan.....	25
Gambar III.2	Grafik Sasaran Lama Tinggal Wisatawan.....	32

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah untuk menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Disamping itu juga untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dimana Dinas Pariwisata mendukung pada Missi ketiga yaitu Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif, dokumen kinerja ini dapat digunakan sebagai berikut:

1. Sebagai sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
3. Sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kerja kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dan perbaikan untuk meningkatkan kinerja instansi tahun berikutnya;

B. Pembentukan OPD

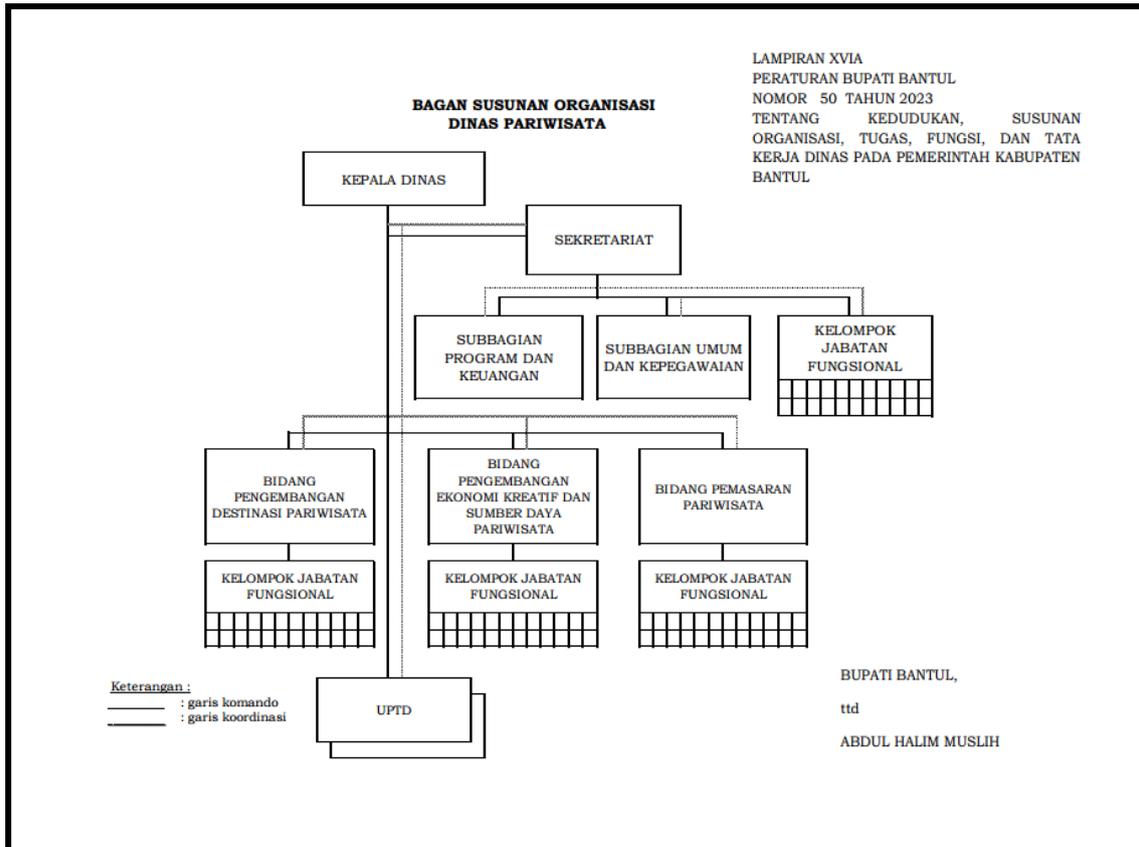
Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya di bidang Pariwisata. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul nomor 126 tahun 2016 yang telah dirubah dengan Peraturan Bupati Bantul nomor 170 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organosasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Dan dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susumam Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, selain itu juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dinas Pariwisata
4. Pelaksanaan administrasi pada Dinas Pariwisata
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

C. Susunan Organisasi

Struktur organisasi OPD digambarkan sebagai berikut :

Gambar I.1
Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul



D. Keragaman SDM

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1
Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan, Golongan dan Jenis Kelamin

NO.	PEGAWAI					
	Pendidikan	Jml	Golongan	Jml	Jenis Kelamin	Jml
1	S-3	-	Gol. IV	5	Laki-Laki	42
2	S-2	3	Gol. III	24	Perempuan	18
3	S-1	15	Gol. II	26		
4	D.III	8	Gol. I	5		
5	SLTA/Sederajat	26				
6	SLTP/Sederajat	6				
7	SD	2				
	Jumlah	60				

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Pariwisata Tahun 2023

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 15 orang (25,86%) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 3 orang (5,17%), D3 8 orang (13,79%), SLTA 23 orang (39,66%). Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 1 (satu) orang, terdiri dari 1 (satu) orang pejabat pelaksana substantif.

E. Isu Strategis

Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari lima kabupaten/kota di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di sebelah selatan, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul dan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kota Madya Yogyakarta. Dengan kondisi wilayah dan masyarakat Kabupaten Bantul yang sedemikian lengkap sangat mendukung berkembangnya pariwisata khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu letak geografis yang cukup dekat dengan Kota Yogyakarta memberikan kemudahan akses bagi wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Bantul.

Beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan perkembangan pariwisata di Kabupaten Bantul pada tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

1. Kepariwisataan Kabupaten Bantul sampai saat ini masih mengandalkan wisata alam pantai yang mana masih dihadapkan pada beberapa persoalan seperti penataan kawasan yang belum sesuai dengan tata ruang, terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas onyek wisata (rambu-rambu, papan informasi, tempat sampah dan peralatannya, akses jalan lingkungan dan lain-lain), kualitas pengelolaan kebersihan obyek wisata yang belum optimal, kurangnya kesadaran pengunjung dalam membuang sampah dan kurangnya pemerataan area sebaran kunjungan

ke obyek wisata yang masih didominasi oleh Pantai Parangtritis sehingga berdampak pada ketidakmerataan pengembangan ekonomi masyarakat.

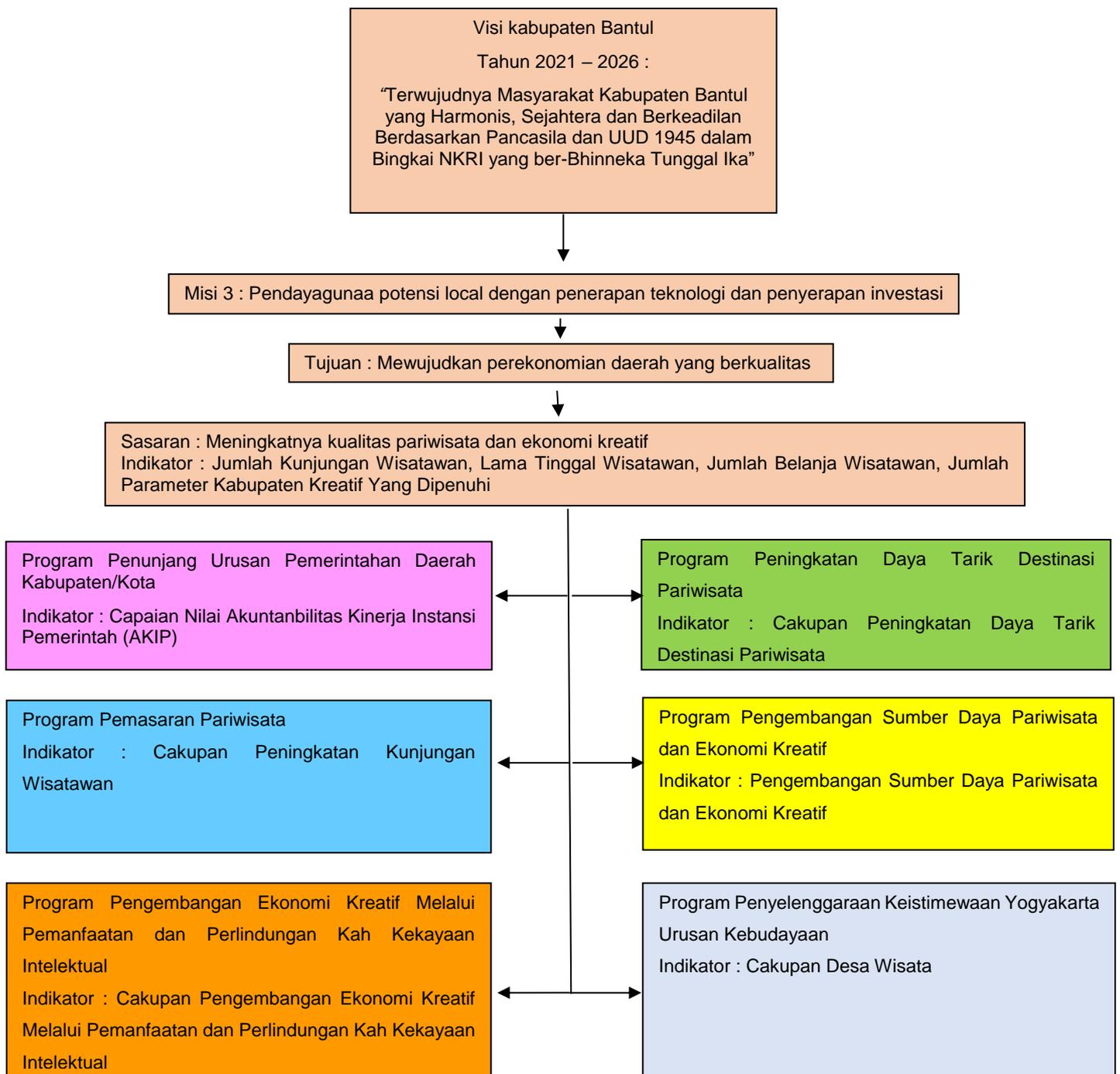
2. Masih terbatasnya kemampuan untuk melakukan upaya-upaya peningkatan daya tarik wisata dengan atraksi/kesenian/festival/event wisata yang berkelas sebagai bagian dari pengenalan dan promosi pariwisata Kabupaten Bantul dalam upaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata.
3. Akuntabilitas dan penerapan konsep Sapta Pesona dan Sadar Wisata di kalangan masyarakat dan pelaku usaha pariwisata Kabupaten Bantul belum optimal.
4. Pertumbuhan industri pariwisata yang cukup pesat dalam bentuk desa wisata, kerajinan dan usaha-usaha pariwisata lain seperti destinasi baru di Kabupaten Bantul belum diimbangi dengan sinergitas yang baik antar pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintah dan swasta). Jumlah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sejumlah 49 kelompok dan desa wisata sejumlah 45 desa (sumber data : Dinas Pariwisata Tahun 2022).
5. Dengan dibangunnya JJLS (Jalur Jalan Lintas Selatan) dan Jembatan Parangtritis II yang posisinya cukup dekat dengan wilayah pantai maka akan berpengaruh terhadap perkembangan kepariwisataan khususnya wisata pantai jika tidak segera dipersiapkan dengan baik dan perencanaan yang matang.
6. Dengan berbagai keterbatasan dan permasalahan, peluang berusaha bagi masyarakat dalam bidang pariwisata cukup menjanjikan. Hal ini dikarenakan pariwisata merupakan sektor andalan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun demikian sektor pariwisata sangat rentan dengan isu-isu seperti situasi politik, bencana alam dan yang belum lama ini adanya covid-19 yang oleh pemerintah ditetapkan sebagai bencana non alam oleh Pemerintah Republik Indonesia.

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam

Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

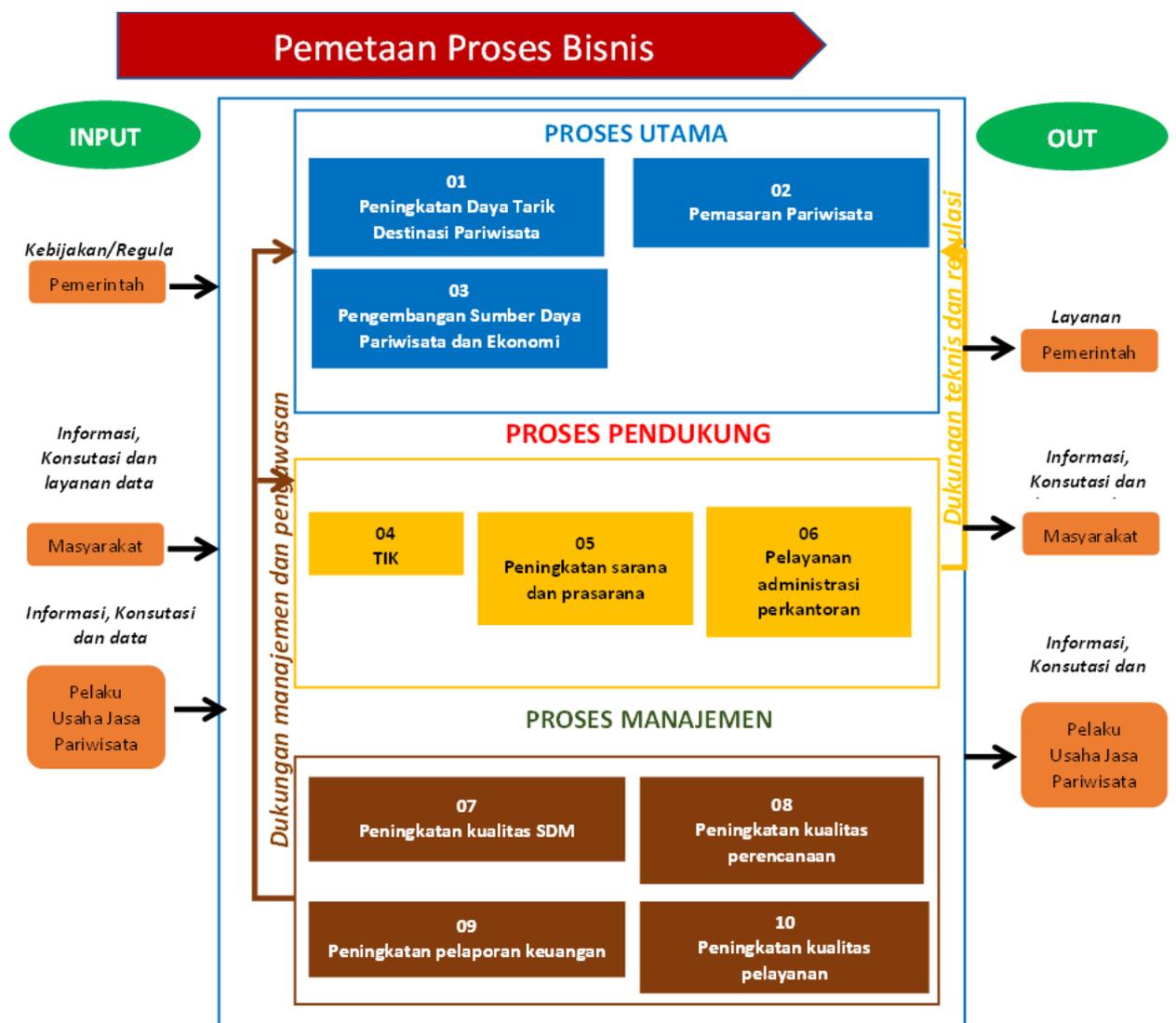
Gambar I.2
Cascading Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2023



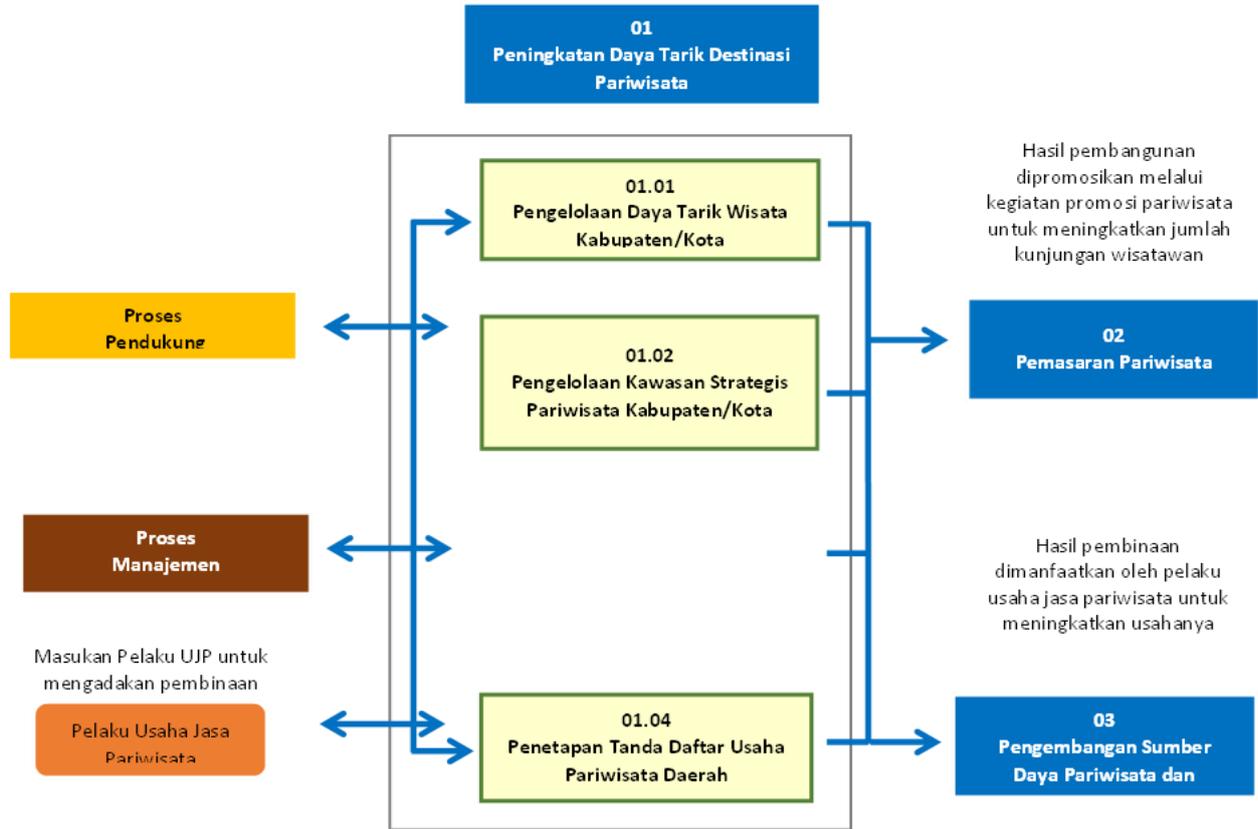
G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul :

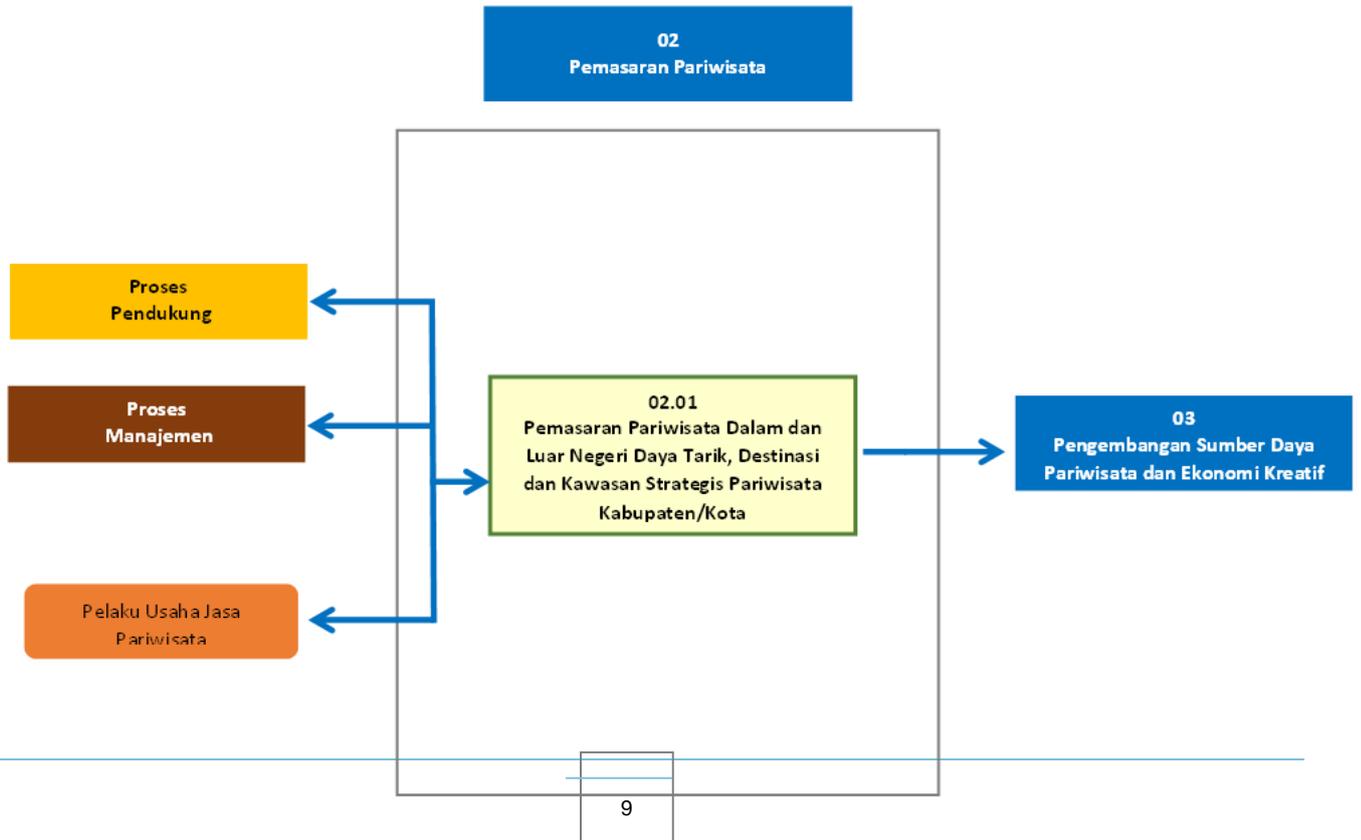
Gambar I.3
Peta Proses Bisnis



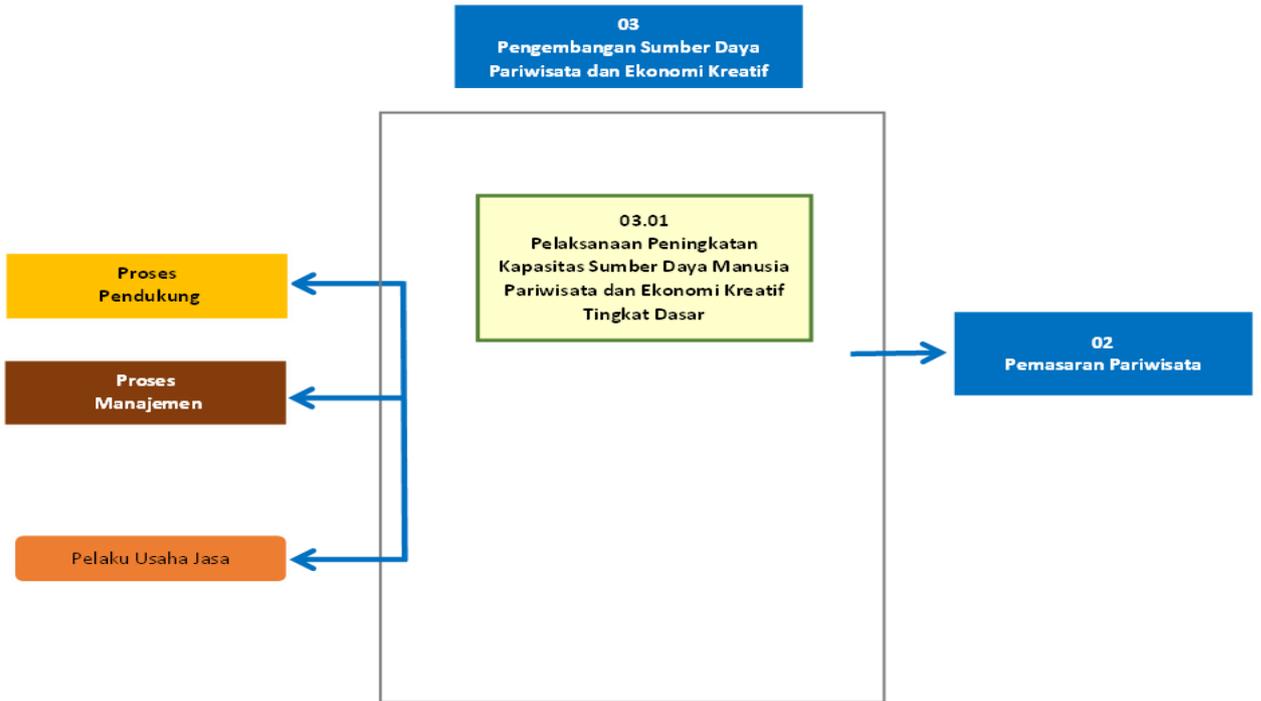
Peta Sub Proses Bisnis 01



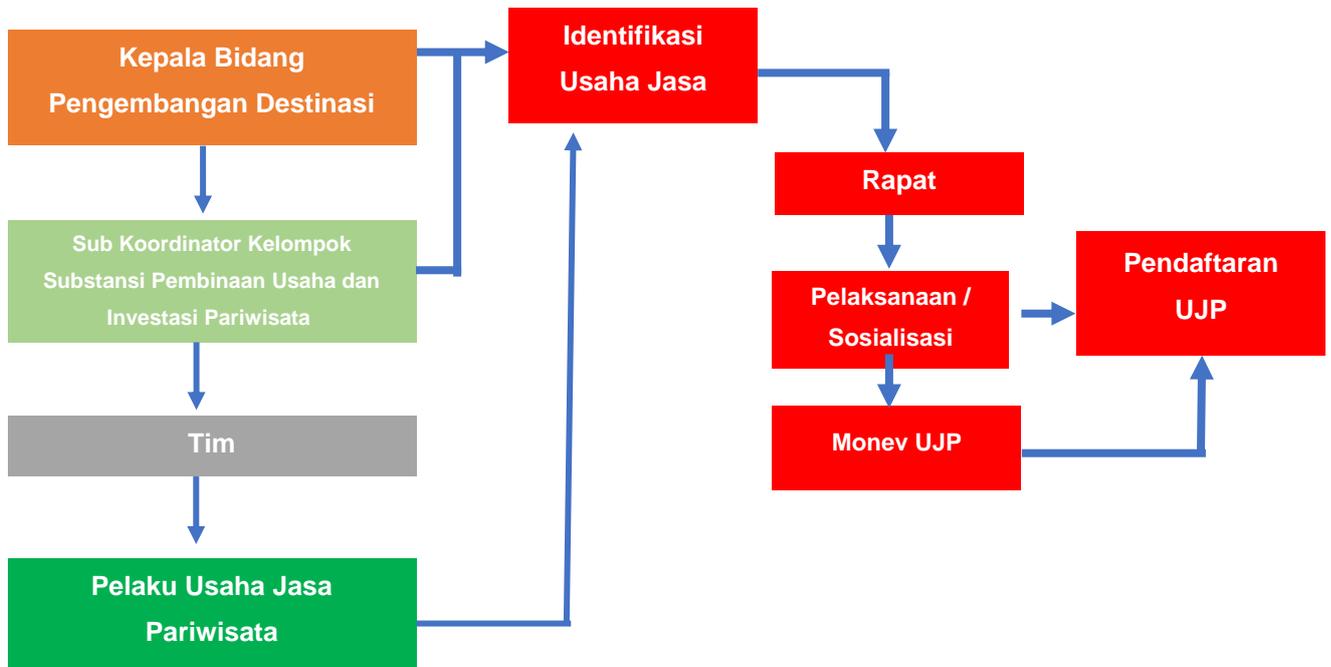
Peta Sub Proses Bisnis 02



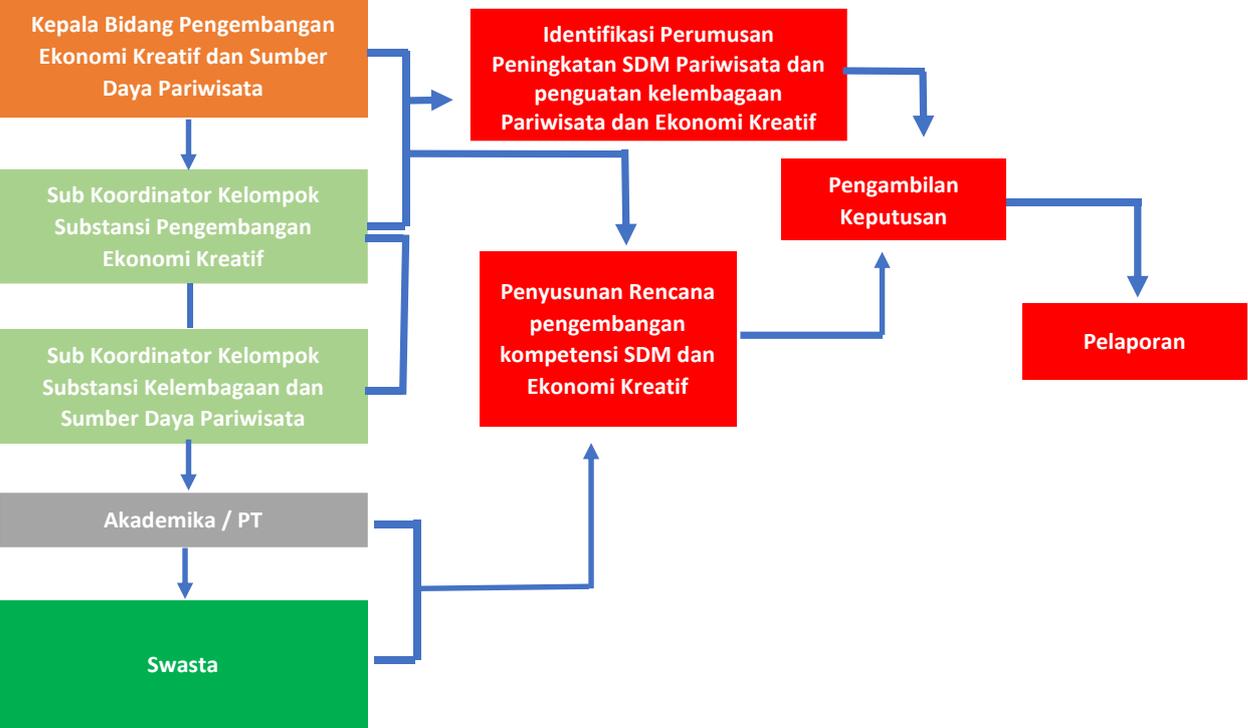
Peta Sub Proses Bisnis 03



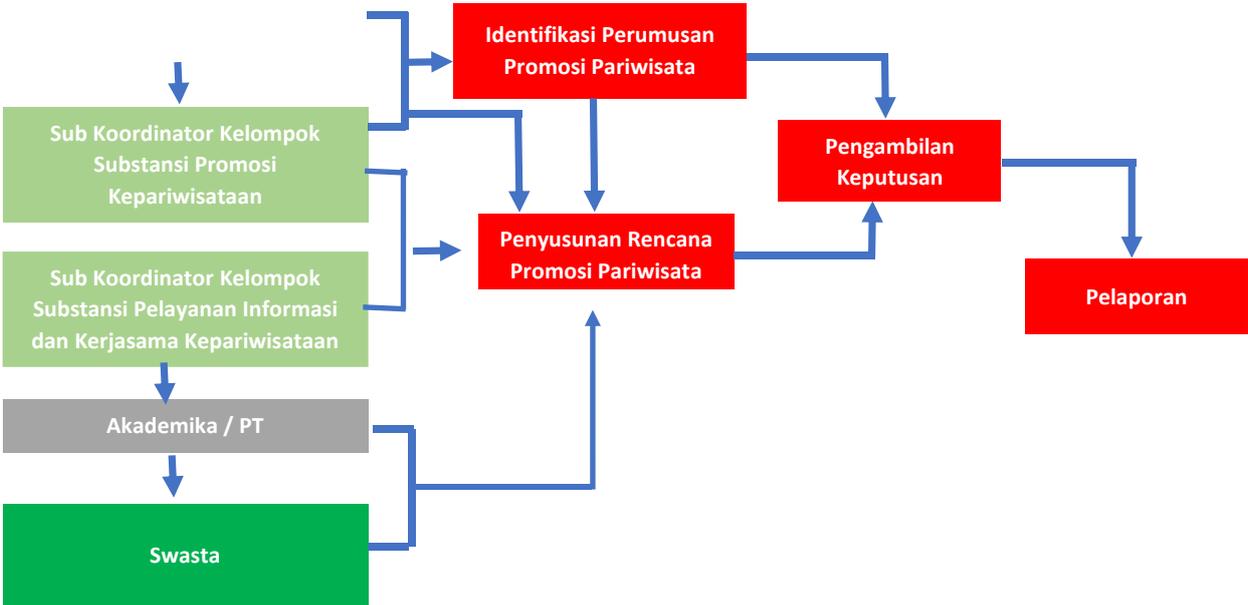
Lintas Fungsi Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

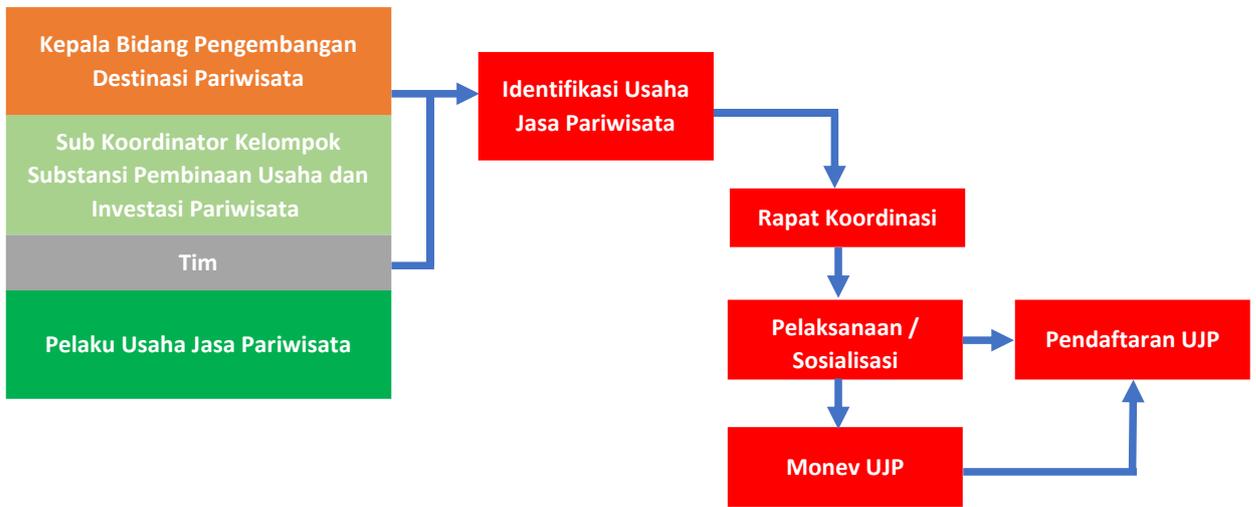


Lintas Fungsi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata

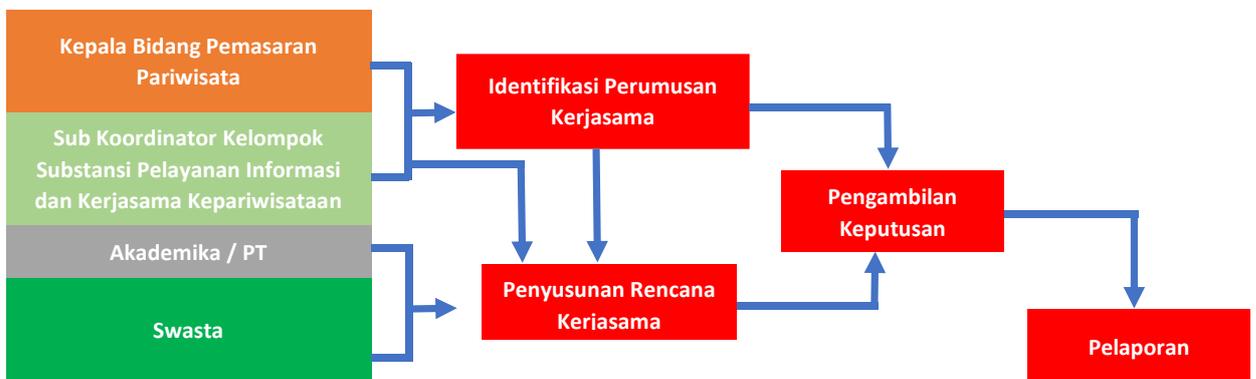


Lintas Fungsi Pengembangan Pemasaran Pariwisata





Lintas Fungsi Pengembangan Pemasaran Pariwisata



H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/062.D/EV.SAKIP/2023 tanggal 20 Maret 2023, perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	Merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada tahun berikutnya melakukan langkah-langkah untuk perbaikan agar dokumen laporan kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (Banchmark Kinerja).	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul akan menindaklanjuti dalam penyusunan laporan kinerja dengan melampirkan perbandingan realisasi kinerja IKU tahun sebelumnya, realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Dinas Pariwisata yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa

Yogyakarta 2017-2023 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Dinas Pariwisata sebagai berikut :

MISI 3 : Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul maka tujuan Dinas Pariwisata adalah sasaran yang daerah yang di dukung Dinas Pariwisata yaitu mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas. Sedangkan sasaran Dinas Pariwisata adalah meningkatnya kualitas pariwisata dan ekonomi kreatif dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) : jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal wisatawan, jumlah belanja wisatawan dan jumlah parameter kabupaten kreatif yang dipenuhi.

Adapun keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sehat, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika”			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Pendayagunaan potensi local dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan inklusif.	Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah kunjungan wisatawan
			Lama tinggal wisatawan
			Jumlah belanja wisatawan
			Jumlah parameter kabupaten kreatif yang dipenuhi

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Visi : “ Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sehat, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika”			
Misi 3 : “ Pendayagunaan potensi local dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pariwisata dan ekonomi kreatif	Mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata 2. Pengembangan Sumber Daya Manusiain Pariwisata 3. Peningkatan promosi dan kerjasama pariwisata 4. Pengembangan produk ekonomi kreatif lokal yang mendukung pariwisata

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
3. Program Pemasaran Pariwisata
4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah kunjungan wisatawan
		Lama tinggal wisatawan
		Jumlah belanja wisatawan
		Jumlah parameter kabupaten kreatif yang dipenuhi

Sumber : Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id,

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2023, IKU dan APBD. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel II.4
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya kualitas pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	2.262.700	I	2.262.700
					I	2.262.700
					III	2.262.700
					IV	2.262.700*
		Lama tinggal wisatawan	hari	1,5	I	1,5
					I	1,5
					III	1,5
					IV	1,5*
			Rupiah/hari	781.397	I	781.397
					I	781.397
					III	781.397

	Jumlah belanja wisatawan			IV	781.397*
	Jumlah parameter kabupaten kreatif yang dipenuhi	Jumlah parameter yang dipenuhi	16	I	16
				I	16
				III	16
				IV	16*

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.344.996.473,-
2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	5.247.359.089,-
3	Program Pemasaran Pariwisata	2.673.835.500,-
4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	161.529.500,-
5	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.490.494.561,-
6	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	1.097.750.000,-
	Jumlah	20.115.965.123,-

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul . Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel II.5

Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas pariwisata dan ekonomi kreatif	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pmda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Secara umum Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel III.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Jumlah kunjungan wisatawan	2.819.698 Orang	2.262.700 orang	5.772.527 orang	255,12%	3.011.654 orang	52,17%
2	Lama tinggal wisatawan	1,57 hari	1,5 hari	1,78 hari	118,67%	2,1 hari	117,98%
3	Jumlah belanja wisatawan	767.234 rupiah/orang	781.397 rupiah/orang	1.768.976 rupiah/orang	226,39%	904.565 rupiah/orang	51,13%
4	Jumlah parameter kabupaten kreatif yang dipenuhi	14 jumlah parameter	16 jumlah parameter	17 jumlah parameter	106,25%	18 jumlah parameter	105,88%

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2023, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran ber kriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 176,61%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Jumlah Kunjungan Wisatawan

Dalam sub bab ini disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang dicerminkan dalam capaian indikator kinerja Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

Tabel III.3
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Jumlah Kunjungan Wisatawan

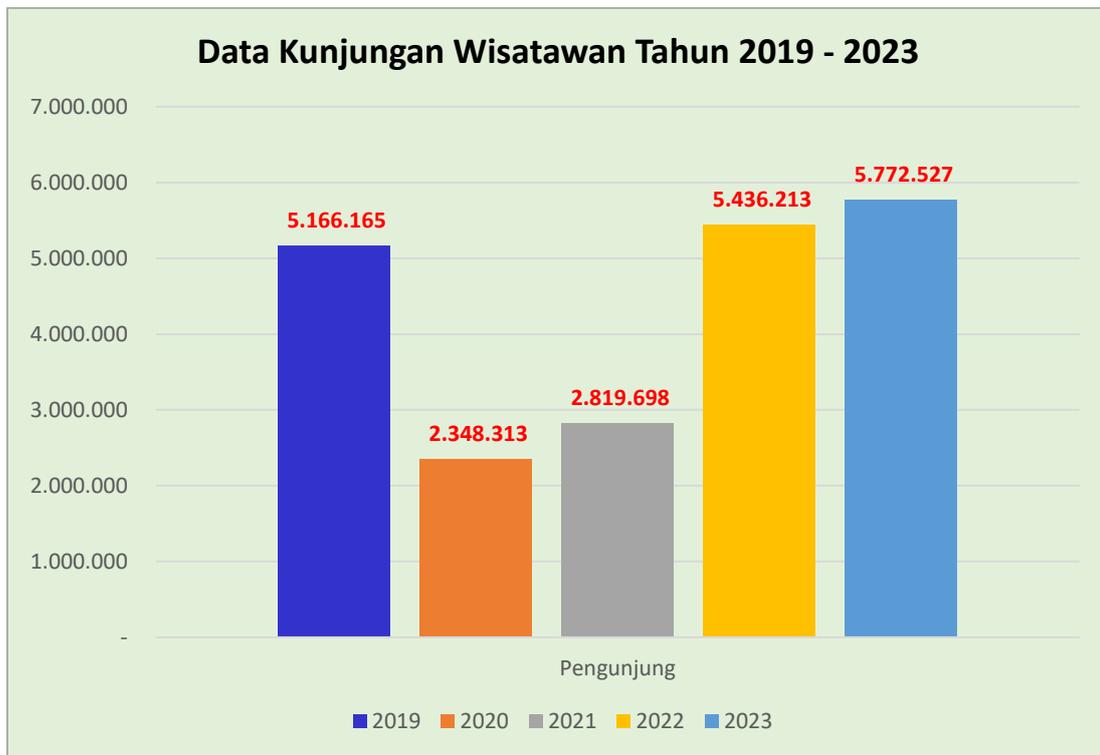
No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	5.436.213 orang	2.262.700 orang	5.772.527 orang	255,12%	3.011.654 orang	52,17%

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 2.262.700 orang, realisasi sebesar 5.772.527 orang, tercapai 255,12% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022) sebesar 5.436.213 orang atau tercapai sebesar 264,28%, maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar 6,19%

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 3.011.654 orang Capaian tahun 2023 ini telah menyumbangkan 52,17% dari target akhir Renstra tahun 2026. Namun kenaikan capaian tersebut belum bisa mencapai secara maksimal karena masih belum meratanya jumlah penyebaran kunjungan wisatawan di semua obyek wisata. Sehingga masih perlu adanya langkah-langkah untuk mengurai permasalahan yang harus diperhatikan agar target IKU bisa mencapai maksimal di semua destinasi yang dikelola. Adapun data pergerakan jumlah kunjungan wisatawan selama 5 (lima) tahun terakhir bisa dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik III.1
Sasaran Jumlah Kunjungan Wisatawan



Permasalahan :

1. Belum optimalnya perwujudan Sapta Pesona dan Sadar Wisata di semua obyek wisata dan pokdarwis.
2. Belum lengkapnya produk perencanaan pengembangan kepariwisataan
3. Belum optimalnya implementasi Sadar Wisata dalam masyarakat dan pelaku wisata
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana obyek wisata yang mendukung

Solusi :

1. Peningkatan sarana dan prasarana wisata dan penguatan SDM serta lembaga pengelolaan obyek wisata
2. Penyusunan RDKP untuk 17 kapanewon dan RTOW untuk setiap obyek wisata sebagai perjabaran RIPPARDA Kabupaten Bantul dalam rangka pembangunan kepariwisataan secara terpadu dan terintegrasi
3. Pelaksanaan pembinaan kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan masyarakat pelaku wisata secara berkesinambungan dengan memanfaatkan semua media maupun melalui pelatihan-pelatihan

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Jumlah Kunjungan Wisatawan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan promosi wisata baik melalui media cetak, elektronik, soail maupun media liannya naik dalam dan luar negeri;
- b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana destinasi wisata khususnya yang dikelola oleh pemerintah daerah sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui retribusi obyek wisata;
- c. Meningkatkan kemitraan pariwisata baik melalui pihak akadimisi maupun dengan pelaku wisata dan ekonomi kreatif;

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Jumlah Kunjungan Wisatawan pada tahun 2023, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan indikator Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 3,13 persen tercapai sebesar 3,13 persen program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Destinasi Wisata Kabupaten/Kota, dengan didukung oleh 2 subkegiatan yaitu :
 - Subkegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan didukung oleh 4 subkegiatan yaitu:
 - Subkegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan' Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - c. Kegiatan Penglolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, didukung oleh 2 subkegiatan yaitu :
 - Subkegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - d. Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota, didukung oleh 4 subkegiatan yaitu :

- Subkegiatan Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata
 - Subkegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
 - Subkegiatan Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata
2. Program Pemasaran Pariwisata dengan indikator Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan, pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 2 persen tercapai 2 persen program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan didukung oleh 4 subkegiatan yaitu :
- Subkegiatan Penguatan Promosi Pariwisata Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
 - Subkegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri
 - Subkegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri
 - Subkegiatan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan indikator Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 25 persen tercapai sebesar 25 persen program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, dengan didukung oleh 2 subkegiatan yaitu :
- Subkegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
 - Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan indikator Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 2 CBT persen tercapai sebesar 2 CBT program ini didukung kegiatan antara lain :

- a. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, didukung oleh 3 subkegiatan yaitu :
 - Subkegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - Subkegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
 - Subkegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan indikator Cakupan Desa Wisata pada tahun 2023 menargetkan sebesar 34,67 persen tercapai sebesar 34,67 persen program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya, didukung oleh 1 subkegiatan yaitu:
 - Subkegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya
 - b. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Bidaya, didukung oleh 1 subkegiatan yaitu :
 - Subkegiatan Peningkatan Lembaga Wisata Budaya

2. Sasaran Lama Tinggal Wisatawan

Dalam capaian indikator kinerja Lama Tinggal Wisatawan realisasinya menunjukkan hasil yang baik dan bisa melampaui target pada tahun 2023. Adapun capaian tersebut bisa dilihat ada table berikut :

Tabel III.4
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Lama Tinggal Wisatawan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Lama Tinggal Wisatawan	2,03 hari orang	1,5 hari	1,78 hari	118,67%	2,1 hari	84,76%

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 1,5 hari, realisasi sebesar 1,78 hari, tercapai 118,67% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya

(2022) sebesar 2,03 hari atau tercapai sebesar 162,40% maka capaian tahun 2023 menurun sebesar 12,32%

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 2,1 hari Capaian tahun 2023 ini telah menyumbang 84,76% dari target akhir Renstra tahun 2026. Langkah-langkah untuk yang harus diperhatikan agar target IKU bisa mencapai maksimal salah satunya dengan peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan kelembagaannya. Adapun permasalahan yang antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya perwujudan Sapta Pesona dan Sadar Wisata di setiap pokdarwis dan desa wisata di Kabupaten Bantul
2. Belum Optimalnya impelentasi Sadar Wisata di masyarakat dan bagi pelaku wisata
3. Belum optimalnya penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM pariwisata

Sedangkan solusinya antara lain :

1. Peningkatan dan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia pariwisata serta kelembagaan pengelolaan destinasi wisata
2. Pelaksanaan pembinaan bagi pokdarwis dan pelaku wisata secara berkesinambungan melalui pelatihan, sosialisasi atau bimtek.

Langkah strategis ke depan untuk meningkatkan IKU Lama Tinggal Wisatawan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan promosi wisata melalui media cetak, elektronik maupun media lainnya baik secara online maupun online
2. Meningkatkan jumlah atraksi atau event wisata di semua destinasi terutama untuk event yang diselenggarakan di malam hari
3. Meningkatkan kemitraan dan kelembagaan pariwisata baik dengan pihak akademisi maupun dengan pelaku wisata/asosiasi

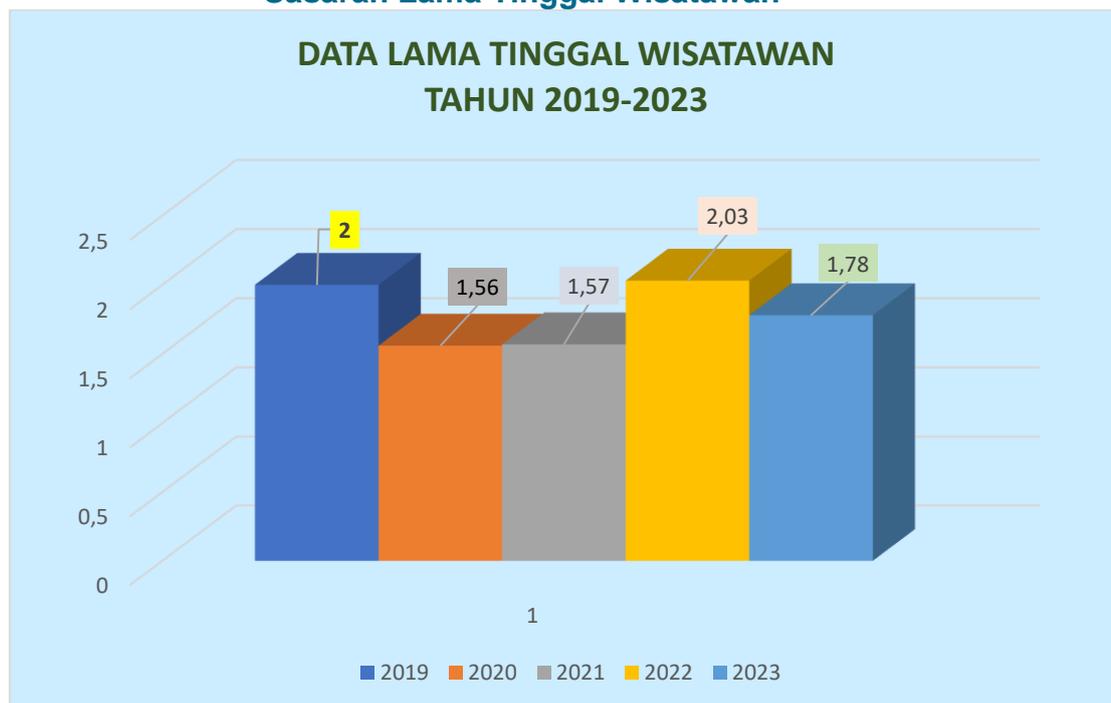
Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Lama Tinggal Wisatawan pada tahun 2023, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan indikator Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata pada tahun 2023 menargetkan sebesar 3,13 persen tercapai sebesar 3,13 persen program ini didukung kegiatan antara lain :
 - e. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Destinasi Wisata Kabupaten/Kota, dengan didukung oleh 2 subkegiatan yaitu :
 - Subkegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

- Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan didukung oleh 4 subkegiatan yaitu:
 - Subkegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan' Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - c. Kegiatan Penglolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, didukung oleh 2 subkegiatan yaitu :
 - Subkegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - d. Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota, didukung oleh 4 subkegiatan yaitu :
 - Subkegiatan Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata
 - Subkegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
 - Subkegiatan Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata
2. Program Pemasaran Pariwisata dengan indikator Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 2 persen tercapai sebesar 2 persen program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Stretegis Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan didukung oleh 4 subkegiatan yaitu :
 - Subkegiatan Penguatan Promosi Pariwisata Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
 - Subkegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri
 - Subkegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri
 - Subkegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri

3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan indikator Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 25 persen tercapai sebesar 25 persen program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, dengan didukung oleh 2 subkegiatan yaitu :
 - Subkegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
 - Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan indikator Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 2 CBT tercapai 2 CBT program ini didukung kegiatan antara lain :
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, dengan didukung oleh 3 subkegiatan yaitu :
 - Subkegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - Subkegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
 - Subkegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan pada tahun 2023 mentargetkan 34,67% tercapai sebesar 34,67% program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya, dengan didukung oleh 3 subkegiatan yaitu :
 - Subkegiatan Pengembangan Atraksi Wisata

Grafik III.2
Sasaran Lama Tinggal Wisatawan



3. Jumlah Belanja Wisatawan

Capaian indikator kinerja Jumlah Belanja Wisatawan realisasinya menunjukkan hasil yang baik dan bisa melampaui target pada tahun 2023. Adapun capaian tersebut bisa dilihat ada table berikut :

Tabel III.5
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Jumlah Belanja Wisatawan**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Jumlah Belanja Wisatawan	767.234 rupiah/orang	781.397 rupiah/orang	1.768.976 rupiah/orang	226,39%	904.565 rupiah/orang	51,13%

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 781.397 rupiah/orang, realisasi sebesar 1.768.976 rupiah/orang, tercapai 226,39% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022) sebesar 767.234 rupiah/orang atau tercapai sebesar 103,10% maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar 130,57%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 904.565 rupiah/orang. Capaian tahun 2023 ini telah menyumbang 51,13% dari target akhir Renstra tahun 2026. Jika dilihat dari capaian pada tahun 2023 merupakan hasil yang cukup maksimal namun tetap harus memperhatikan agar target IKU bisa tercapai secara maksimal dan berkesinambungan maka salah satunya dengan melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan kelembagaannya dan pengembangan ekonomi kreatif.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Jumlah Belanja Wisatawan pada tahun 2023, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan indikator Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata pada tahun 2023 menargetkan sebesar 3,13 persen tercapai sebesar 3,13 persen program ini didukung kegiatan antara lain :
 - f. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Destinasi Wisata Kabupaten/Kota, dengan didukung oleh 2 subkegiatan yaitu :
 - Subkegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan didukung oleh 4 subkegiatan yaitu:
 - Subkegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan' Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - c. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, didukung oleh 2 subkegiatan yaitu :
 - Subkegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - d. Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota, didukung oleh 4 subkegiatan yaitu :
 - Subkegiatan Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata

- Subkegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
 - Subkegiatan Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata
2. Program Pemasaran Pariwisata dengan indikator Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan, pada tahun 2023 menargetkan sebesar 2 persen tercapai 2 persen program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan didukung oleh 4 subkegiatan yaitu :
- Subkegiatan Penguatan Promosi Pariwisata Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
 - Subkegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri
 - Subkegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri
 - Subkegiatan Peningkatan Kerj Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan indikator Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 2023 menargetkan sebesar 25 persen tercapai sebesar 25 persen program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, dengan didukung oleh 2 subkegiatan yaitu :
- Subkegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
 - Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan indikator Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2023 menargetkan sebesar 2 CBT persen tercapai sebesar 2 CBT program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, didukung oleh 3 subkegiatan yaitu :
- Subkegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

- Subkegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
 - Subkegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan indikator Cakupan Desa Wisata pada tahun 2023 menargetkan sebesar 34,67 persen tercapai sebesar 34,67 persen program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya, didukung oleh 1 subkegiatan yaitu:
 - Subkegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya
 - b. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Bidaya, didukung oleh 1 subkegiatan yaitu :
 - Subkegiatan Peningkatan Lembaga Wisata Budaya

4. Jumlah Parameter Kabupaten Kreatif Yang Dipenuhi

Dalam capaian indikator kinerja Lama Tinggal Wisatawan realisasinya menunjukkan hasil yang baik dan bisa melampaui target pada tahun 2023. Adapun capaian tersebut bisa dilihat ada table berikut :

Tabel III.6
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Jumlah Parameter Kabupaten Kreatif Yang Dipenuhi

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Jumlah Parameter Kabupaten Kreatif Yang Dipenuhi	14 Jumlah Parameter	16 Jumlah Parameter	17 Jumlah Parameter	106,25%	18 Jumlah Parameter	94,44%

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Jumlah Parameter Kabupaten Kreatif Yang Dipenuhi pada tahun 2023, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan indikator Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada

tahun 2023 menargetkan sebesar 16 Jumlah Parameter tercapai sebesar 17 Jumlah Parameter program ini didukung kegiatan antara lain :

- a. Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, dengan didukung oleh 2 subkegiatan yaitu :
- Subkegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
 - Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2023 di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sebesar Rp. 20.115.965.123,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp. 19.680.706.586,23,00, atau sebesar 97,84%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.7

Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	5.247.359.089,-	26,09%
2	Program Pemasaran Pariwisata	2.673.835.500,-	13,29%
3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	161.529.500,-	0,80%
4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.490.494.561,-	7,41%
5	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	1.097.750.000,-	5,46%
Jumlah		10.770.968.650,-	53,54%
Belanja Pendukung		9.344.996.473,-	46,46%
Total Belanja		20.115.965.123,-	100,00%

Sumber : Esakip-ROPK Kabupaten Bantul Tahun 2023

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran

untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sebesar Rp.10.770.968.650,00 atau sebesar 53,54% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.9.344.996.473,00 atau sebesar 46,46% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Jumlah Kunjungan Wisatawan dengan besaran anggaran 54,54% dari total belanja. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran Jumlah Kunjungan Wisatawan sebesar 0,80% dari total anggaran belanja.

Belanja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 7.031.727.017,00 teralisasi sebesar 34,96 %. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2023 sebesar 97,84% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 53,54%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 46,46%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Jumlah Kunjungan Wisatawan sebesar 26,09%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Jumlah Kunjungan Wisatawan sebesar 0,80%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Jumlah Kunjungan Wisatawan menyerap anggaran paling besar yaitu 26,09% dari target. Sedangkan sasaran Jumlah Parameter Kabupaten Kreatif Yang Dipenuhi menyerap anggaran terkecil yaitu 0,80% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.8
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	3,13 persen	3,13 persen	100	5.247.359.089,-	5.189.925.587,-	98,91
2	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	2 persen	2 persen	100	2.673.835.500,-	2.633.329.922,-	98,49
3	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemnafaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	25 persn	25 persen	100	161.529.500,-	155.764.838,-	96,43
4	Pengembangan Sumber Daya Parisata dan	2 CBT	2 CBT	100	1.490.494.561,-	1.436.154.410,-	96,35
5	Cakupan Desa Wisata	34,67 persen	34,67 persen	100	1.197.750.000,-	1.192.381.730,-	99,55
6	Capaian Nilai Akuntanilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	80 angka	100	9.344.996.473,-	9.073.150.100,-	97,10

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2023 sebesar 2,19%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 2,05%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 2,90%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Jumlah Kunjungan Wisatawan sebesar 2,05%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Jumlah Parameter Kabupaten Kreatif Yang Dipenuhi sebesar 0,04%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Jumlah Kunjungan Wisatawan, Lama Tinggal Wisatawan dan Jumlah Belanja Wisatawan,

memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 2,05% dari target anggaran. Sedangkan sasaran Jumlah Paramter Kabupaten Kreatif Yang Dipenuhi, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 0,04% dari anggaran target.

Efisiensi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.9
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	10.770.968.650,-	10.607.556.486,23	163.412.163,77	1,52
2	Lama Tinggal Wisatawan				
3	Jumlah Belanja Wisatawan				
4	Jumlah Parameter Kabupaten Kreatif Yang Dipenuhi				
Jumlah		10.770.968.650,-	10.607.556.486,23	163.412.163,77	1,52
Belanja Pendukung		9.344.996.473,-	9.073.150.100,00	271.846.373,00	2,91
Total Belanja		20.115.965.123,-	19.680.706.586,23	435.258.536,77	2,16

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

E. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul ikut mendukung program peningkatan perekonomian terutama dalam kegiatan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang memiliki tugas menyelenggaraan atraksi wisata seperti pentas seni di obyek wisata. Dengan banyaknya atraksi wisata yang diselenggarakan maka akan meningkatkan perekonomian disekitarnya. Dalam kegiatan ini tidak lepas adanya kerjasama dengan lintas perangkat daerah seperti Dinas Perhubungan, Satuan Pol PP, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kebudayaan.

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 176,61% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi/Tinggi/Sedang/Rendah**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada tahun 2023 antara lain adalah :

1. Jumlah Sumber Daya Manusia dan anggaran pendukung sasaran terpenuhi
2. Kerjasama dan koordinasi yang baik antar bidang maupun antar stakeholder pariwisata

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Peningkatan promosi pariwisata melalui media on line maupun off line
2. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana destinasi maupun fasilitas umum di semua destinasi wisata

3. Peningkatan SDM Pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif serta penguatan kelembagaan pariwisata

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih Tuhan Yang Maha Esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN

Rencana Stretegis

Dinas Pariwisata

Periode : 2022 – 2026

No	Tujuan	Sasaran Stretegis	Indikator Kinerja	Satuan	Target per Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya kualitas pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	2.057.000	2.262.700	2.488.970	2.737.867	3.011.654
			Lama tinggal wisatawan	Hari	1,25	1,50	1,75	2,0	2,1
			Jumlah belanja wisatawan	Rupiah/orang	744.188	781.397	820.467	861.490	904.565
			Jumlah parameter kabupaten kreatif yang dipenuhi	Jumlah parameter	14	16	18	18	18

**LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA**

Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	2.262.700	I	2.262.700
					II	2.262.700
					III	2.262.700
					IV	2.262.700*
		Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1.5	I	1.5
					II	1.5
					III	1.5
					IV	1.5*
		Jumlah Belanja Wisatawan	Rupiah/orang	781.397	I	781.397
					II	781.397
					III	781.397
					IV	781.397*
		Jumlah Parameter Kabupaten Kreatif Yang Dipenuhi	Jumlah Parameter	16	I	16
II	16					
III	16					
IV	16*					

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 1.197.750.000,-
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Rp. 9.344.996.437,-
3.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 5.247.359.089,-
4.	Program Pemasaran Pariwisata (APBD dan DAK Non Fisik)	Rp. 2.673.835.500,-
5.	Program Pengembangan ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rp. 161.529.500,-
6.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	<u>Rp. 1.490.494.561,-</u>
	Jumlah Anggaran	Rp.20.115.965.123,-

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL
B. ABDUL HALIM MUSLIH

Bantul, 26 Oktober 2023

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PARIWISATA
DINAS PARIWISATA
KWINIARTO HERU PRABOWO, S.Sos.
* NIP. 197204131998031008

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL



LAPORAN HASIL EVALUASI

**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.**

NOMOR	:	061/062.D/EV.SAKIP/2023
TANGGAL	:	20 Maret 2023

- f. Keputusan Bupati Bantul Nomor 624 Tahun 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- g. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2023 tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023.
- h. Surat Tugas Inspektur nomor: 62/PKPT/2023 untuk melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada: Badan Pengelolaan Keuangan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Dinas Pariwisata; Kapanewon Banguntapan; dan Kapanewon Sewon.

2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil)

Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP Perangkat Daerah
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b. Penilaian pengukuran kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran Umum

Dinas Pariwisata dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 170 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pariwisata.

Dinas Pariwisata mempunyai memiliki fungsi, antara lain :

- a. perumusan rencana kerja Dinas;
- b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pariwisata;
- e. penyelenggaraan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
- f. penyelenggaraan pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya pariwisata;
- g. penyelenggaraan pemasaran pariwisata;
- h. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- j. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, perpustakaan, kearsipan dan kerjasama serta budaya pemerintahan Dinas;
- k. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
- l. pengoordinasian dan pembinaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Dinas;
- m. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan

data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (clean and good governance) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (good governance) dan berorientasi hasil (result oriented government) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati (Misi 3) yaitu: "Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi", Dinas Pariwisata telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak empat indikator.

Berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama adalah 157.44% Secara rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Jumlah kunjungan wisatawan	2.057.000 org	5.436.213	264.28

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Realisasi
			orang hari	
2	Lama tinggal wisatawan	1.25 Hari	2.03	162.40
3	Jumlah belanja wisatawan	744.188 Rp/org	767.234 Rp/org	103.10
4	Jumlah Parameter kabupaten kreatif yang dipenuhi	14 jumlah parameter	14 jumlah parameter	100

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 157.44% termasuk dalam kategori sangat berhasil.

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Dari hasil evaluasi akuntabilitas tahun sebelumnya Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/073.B/Ev.SAKIP/2022 tanggal 23 Maret 2022 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul berupa:

No	Saran/Rekomendasi	Langkah-Langkah Tindak Lanjut
1	Menyusun perencanaan kinerja selaras sampai dengan kinerja individu.	Dalam penyusunan laporan kinerja tahun 2022 sudah selaras dengan perencanaan dan penganggaran yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri PANRB nomor 53 tahun 2014. Dan juga sudah menyampaikan permasalahan dan solusi dalam pencapaian target kinerja juga langkah-langkah yang akan ditempuh untuk masa depan.
2	Melakukan review dan penyempurnaan perencanaan kinerja dan penganggaran yang terukur agar dapat meningkatkan capaian kinerja setiap tahunnya	
3	Dalam penyusunan laporan agar lebih disempurnakan dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri PANRB nomor 53 tahun 2014 agar dapat menyajikan analisis efisiensi sumber daya secara lengkap.	

No	Saran/Rekomendasi	Langkah-Langkah Tindak Lanjut
4	Dalam penyusunan laporan kinerja agar disampaikan untuk solusi dan permasalahan terkait pelaksanaan kegiatan	
5	Belum dimunculkan untuk langkah-langkah yang ditempuh untuk masa depan.	
6	Agar lebih memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik.	

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 82,49. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3
penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
			TAHUN 202X
1	Perencanaan Kinerja	30.00	25.44
2	Pengukuran Kinerja	30.00	25.14
3	Pelaporan Kinerja	15.00	12.26
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	19.65
Nilai Akuntabilitas Kinerja			82.49

Sumber data Lembar Kerja Evaluasi

- a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 25,44 atau 84,81% dari bobot sebesar 30;
- b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 25,14 atau 83,79% dari bobot sebesar 30;
- c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,26 atau 81,76% dari bobot sebesar 15;
- d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 19,65 atau 78,60% dari bobot sebesar 25.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, dengan rincian sebagai berikut:

A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 25,44 atau 84,81% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4
evaluasi komponen perencanaan kinerja

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	25.44	84.81
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	5.40	90.00
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9.00	7.85	87.27
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	12.19	81.25

Sumber data Lembar Kerja Evaluasi

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

1) Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia

- a) Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul telah memiliki acuan atau pedoman perencanaan berupa:
- (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - (2) Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
 - (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Aplikasi Terintegrasi Dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
- b) Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dikukuhkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026;
- c) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

- d) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
- e) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran;

Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan

- 2) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyalarsan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*)
 - a) Dinas Pariwisata telah menyusun Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perencanaan anggaran telah ditetapkan dan dokumen tersebut bisa diakses melalui website
 - b). Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Tugas fungsi OPD, berorientasi hasil, dan didasarkan atas rumusan isu strategis organisasi;
 - c) Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar, *generally accepted*), selaras dengan RPJMD, berdasarkan indikator yang SMART, berdasarkan basis data yang memadai, dan berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis;
 - d) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan. IKU selaras dengan RPJMD, kontrak kinerja, dan tupoksi, menggambarkan *core business* dan isu strategis yang berkembang serta keadaan yang ingin dicapai, menjawab permasalahan yang teridentifikasi;

- e) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*);
- g) Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja;
- h) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja. Dalam bentuk SKP

3) Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

- a) Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul telah menyusun rencana anggaran yang mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;
- b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai;
- c) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*;
- d) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik yang dapat dilihat dari dokumen laporan monev, Renja dan Perjanjian Kinerja

B. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 25,14 atau 83,79% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5
evaluasi komponen pengukuran kinerja

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	25.14	83.79
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	5.40	90.00
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	7.59	84.29
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	12.15	81.00

Sumber data Lembar Kerja Evaluasi

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

1) Pengukuran kinerja telah dilakukan.

- a) Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja berupa:
 - (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, dalam LKJ tertulis 4 formulasi penghitungan untuk mengukur indikator kinerja yaitu:
 - (1) Jumlah kunjungan wisatawan
 - (2) Lama tinggal wisatawan
 - (3) Jumlah belanja wisatawan

- (4) Jumlah Parameter kabupaten kreatif yang dipenuhi
- c) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan menggunakan SOP Pengumpulan Data Kinerja dan aplikasi berbasis web Esakip-ROPK, Simral, SIPD,

2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan

- a) Data kinerja yang dikumpulkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
- b) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;
- c) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi Esakip-ROPK, Simral, SIPD, eKinerja, SAPA ASN, SIPD, Simral Simpersada, dan Simas.

3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien

- a) Pengukuran Kinerja oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
- b) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi, penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;
- c) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Kinerja serta terlihat pada aplikasi Simral dan eSakip-ROPK;
- d) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

C. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 15 memperoleh nilai 12,26 atau 81,76% dengan rincian sebagai berikut

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	12.26	81.76
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	2.60	86.67
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4.50	3.45	76.67
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	6.21	82.86

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

1) Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan Kinerja

Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala dan tepat waktu, direviu secara berjenjang, diformalkan, dan dipublikasikan

2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya

a) Dokumen Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dokumen kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah belum mencantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja), Laporan kinerja

telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;

- b) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

- a) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
- b) Informasi dalam laporan kinerja secara berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;
- c) Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dengan bobot nilai **25** memperoleh nilai **19,65** atau **78,60%** dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	19.65	78.60
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	4.50	90.00
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	6.15	82.00
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12.50	9.00	72.00

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan**
 - a) Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit kerja/perangkat daerah;
 - b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai**
 - a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar;
 - b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai dengan menggunakan teknologi informasi.
- 3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja**
 - a) Dalam Laporan LKJ tertulis seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindaklanjuti akan tetapi Dinas Pariwisata belum melampirkan dokumen tindak lanjut yang disarankan;
 - b) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal, Dinas Pariwisata belum mencantumkan dokumen tindak lanjut;
 - c) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

2. Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada tahun berikutnya dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan agar dokumen laporan kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional (Benchmark Kinerja)

C. PENUTUP

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul memperoleh nilai 82,49. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi memuaskan

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Perangkat Daerah secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR,

Hermawan Setiaji, S.P., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740322 199801 1001

